

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian secara umum dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan sudah berjalan namun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan permasalahan yang ada didalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dari temuan-temuan berikut:

##### **1. Karakteristik Masalah**

Dalam pelaksanaannya, tidak banyak hambatan teknis yang dialami DISDUKCAPIL dalam melaksanakan KIA sehingga tujuan formal dari kebijakan dapat terealisasi yang dapat dilihat dari sudah berjalannya kebijakan sejak tahun 2016. Namun, kesadaran masyarakat dalam membuat KIA masih dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan yang dimilikinya yang mendorong masyarakat untuk memiliki KIA. Hal ini karena masyarakat tidak tahu akan kegunaan dan manfaat dari KIA itu sendiri. Hal ini juga disebabkan oleh prasangka masyarakat yang sudah beranggapan bahwa KIA tidak memiliki manfaat apapun, padahal KIA dapat menjadi acuan pembuatan kebijakan yang nantinya akan bermanfaat bagi anak mereka sendiri.

Selain itu, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Disukcapil disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya pemilihan kepala daerah sehingga pihak Disdukcapil harus mendunda sosialisasi tentang KIA. Kemudian, kurangnya sosialisasi ini juga dikarenakan adanya pandemi yang mengharuskan

Disdukcapil untuk menunda segala kegiatan yang ada. Selain itu terdapat permasalahan sosial yang dialami DISDUKCAPIL yang secara teknis tidak sulit untuk diselesaikan yaitu terlambatnya pendistribusian blanko sehingga menghambat proses pencetakan KIA dan membuat KIA lama untuk diproses. Maka, faktor kesulitan teknis dari teori yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier tidak memengaruhi secara maksimal terhadap pelaksanaan KIA di Disdukcapil Kota Bandung.

## 2. Karakteristik Kebijakan

### - Diskresi Pelaksana

Hal ini dapat terlihat dari proses pemberian layanan belum sesuai dengan aturan yang ada yaitu tidak adanya konsistensi ketepatan waktu dalam penerbitan KIA yang memakan waktu lebih dari 3 hari yang merupakan batas maksimal penerbitan KIA. Selain KIA hanya diprioritaskan bagi anak usia 12-15 tahun di Disdukcapil Kota Bandung, padahal dalam Permendagri No 2 tahun 2016 dijelaskan bahwa KIA diperuntukkan bagi anak usia 0-17 tahun. Maka tujuan dari kebijakan agar terjadi keseragaman identitas anak secara nasional sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 sulit untuk dicapai apabila KIA hanya diprioritaskan bagi anak usia 12-15 tahun saja.

Maka faktor diskreasi pelaksana yang dikemukakan Mazmanian dan Sabatier tidak memengaruhi secara maksimal terhadap pelaksanaan KIA di Disdukcapil Kota Bandung.

### 3. Variabel lingkungan

#### – Kondisi Teknologi

Dari segi pemahaman teknologi, pihak Disdukcapil sudah menyediakan *platform* sebagai inovasi pendaftaran KIA secara online maupun offline yang mampu memudahkan masyarakat dalam pembuatan KIA. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui adanya inovasi tersebut baik aplikasi online seperti SALAMAN (Selesai dalam Genggaman) dan online yang salah satunya adalah Gerai Anjungan Kartu Identitas Anak yang dikhususkan untuk pembuatan KIA damapun offline tersebut. Sehingga faktor kondisi ketersediaan teknologi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier belum memengaruhi secara maksimal terhadap pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Kota Bandung.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KIA belum berjalan secara maksimal karena beberapa faktor yang tidak terlaksana dengan maksimal yaitu kesulitan teknis, diskresi pelaksana dan kondisi ketersediaan teknologi. Maka aktor pelaksana diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi KIA agar terus berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

## 6.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran peneliti untuk pihak DISDUKCAPIL adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi terkait KIA secara berkala. Informasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi ke setiap kecamatan dan dapat dilakukan secara online yaitu melalui media sosial, dinas dapat membuat akun khusus di setiap platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan dinas dapat membuat sosialisasi berupa video di Youtube untuk memberi informasi terkait Kartu Identitas Anak. Selain itu, sosialisasi juga dapat dilakukan melalui radio dan surat kabar.
- 2) Menyediakan informasi secara digital berdasarkan *real time* untuk mengurangi terjadinya kendala teknis seperti terlambatnya pendistribusian blanko. Pihak DISDUKCAPIL lebih baik memperbaiki sistem aplikasi SALAMAN agar dapat beroperasi secara normal sehingga pihak DISDUKCAPIL dapat memprediksikan jumlah pendaftar KIA setiap harinya.
- 3) Memberikan informasi mengenai keterlambatan penerbitan KIA, sehingga pemohon dapat mengambil KIA pada jadwal dan hari yang telah ditetapkan oleh Dinas, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian dan tidak perlu bolak balik ke kantor DISDUKCAPIL.
- 4) Pihak DISDUKCAPIL dapat bekerja sama dengan sekolah dan rumah sakit di kota Bandung dalam meningkatkan jumlah cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak. Sehingga dapat mempermudah orang tua untuk mendaftar sendiri

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Winarno, B. 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pessindo,
- Agustino, L. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- H. Laswell dan A. Kaplan. 1970. *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- D. Mazmanian dan P.A Sabatier. 1983. *Implementing and Public Policy*. United States of America: Scott Foresman and Company
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit APII Bandung
- Merriam, S. 2009. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. USA: Jossey-Bass

### Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 27

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

### **Website**

Makamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Ahli Pemohon: Data Kependudukan Tidak Akurat, Rawan Dipolitisir’.

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8079> Diakses Pada tanggal 27 Juli 2020

CPAR, ‘On the Nature of Public Policy’

<https://cpar.net/index.php/cpar/article/viewFile/32/21> (24.2.2016)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, ‘Profil’

<https://disdukcapil.bandung.go.id/?cont=profil> . Diakses tanggal 17 April 2020

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, ‘Visi Misi’

<https://disdukcapil.bandung.go.id/?cont=profil%2FvisiMisi> . Diakses tanggal 17 April 2020

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, ‘Tugas dan Fungsi’

<https://disdukcapil.bandung.go.id/?cont=profil%2Ftugasdanfungsi> . Diakses tanggal 17 April 2020

Nursalikhah, A. “Kesadaran Masyarakat Jabar Urus Dokumen Kependudukan Minim,”

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/08/o5aytt366-kesadarmasyarakat-jabar-urus-dokumen-kependudukan-minim>. Diakses tanggal 25 Juli 2020

- Nursyabani, F. 'Anjungan Kartu Identitas Anak Disdukcapil di BTC jadi Primadona' <https://ayobandung.com/read/2019/08/22/61306/anjungan-kartu-identitas-anak-disdukcapil-di-btc-jadi-primadona> . Diakses tanggal 25 Juli 2020
- Fadhilah, R. 'Tempelkan Sidik Jari, Kartu Identitas Anak Pun Jadi' <https://humas.bandung.go.id/berita/tempelkan-sidik-jari-kartu-identitas-anak-pun-jadi> . Diakses tanggal 25 Juli 2020
- Solehanudin, M. 'Kini Cetak Kartu Identitas Anak di Bandung Murah' <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4646887/kini-cetak-kartu-identitas-anak-di-bandung-mudah> . Diakses tanggal 25 Juli 2020
- Kirnandita, P. 'Menimbang Untung dan Urgensi Kartu Identitas Anak' <https://tirto.id/menimbang-untung-dan-urgensi-kartu-identitas-anak-csiV>. Diakses tanggal 25 Juli 2020
- Halobdg.com. 'Cara Membuat Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Bandung' <https://www.halobdg.com/bewara/cara-membuat-kartu-identitas-anak-kia-di-bandung/> . Diakses tanggal 11 Agustus 2020
- T.SM. 'Tanggapi Kicauan di Twitter, Wali Kota Bandung Panggil Pegawai Disdukcapil'' <https://jabar.tribunnews.com/2014/08/04/tanggapi-kicauan-di-twitter-wali-kota-bandung-panggil-pegawai-disdukcapil>. Diakses tanggal 11 Agustus 2020
- Hendra. 'Masyarakat Belum Mendapat Sosialisasi Terkait KIA' <https://fokusjabar.co.id/2016/02/12/masyarakat-belum-mendapat-sosialisasi-terkait-kia/>. Diakses tanggal 16 Agustus 2020